

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era yang terus berkembang dengan dinamika perubahan, penguasaan dan pemahaman terhadap kompetensi menjadi faktor penting untuk meraih kesuksesan secara personal maupun profesional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi didefinisikan sebagai "seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya." Seorang guru adalah tokoh sentral dalam pendidikan, memenuhi berbagai peran seperti informator, motivator, dan fasilitator. Penguasaan materi pembelajaran sangat penting untuk pengajaran yang efektif, terutama di bawah kurikulum Merdeka Belajar yang berpusat pada siswa, memastikan pengalaman belajar yang bermakna." (Naibaho & Sitorus, 2023). Peran dan tanggung jawab guru mencakup membimbing peserta didik agar mampu mencapai prestasi sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu meningkatkan kecerdasan masyarakat serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, kompetensi menjadi elemen yang sangat penting bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007, kompetensi profesional merujuk pada kemampuan guru untuk menguasai materi pembelajaran secara komprehensif. Hal ini mencakup (a) pemahaman konsep, struktur, dan metode dalam ilmu/teknologi/seni yang relevan dengan materi ajar; (b) penguasaan materi ajar sesuai dengan kurikulum sekolah; (c) pemahaman hubungan konsep di antara mata pelajaran terkait; (d) kemampuan menerapkan konsep ilmiah dalam kehidupan sehari-hari; dan (e) kesiapan untuk bersaing secara profesional dalam konteks global, dengan tetap menghargai dan mempertahankan nilai serta budaya nasional. Standar kompetensi guru tersebut juga diperkuat dalam Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menetapkan bahwa

pendidik wajib memiliki empat kompetensi utama, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Regulasi ini menjadi dasar dalam sistem penjaminan mutu pendidikan nasional, termasuk dalam pengembangan literasi digital pendidik.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengukur profesionalisme guru adalah melalui pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG). UKG dirancang sebagai alat untuk menetapkan standar kemampuan profesional seorang guru. Dengan adanya uji ini, guru yang terbukti kompeten diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, kreatif, efektif, serta menyenangkan. Hal ini bertujuan untuk mendukung pengembangan potensi siswa secara maksimal.

Untuk mencapai standar profesionalisme tersebut, guru tidak hanya dituntut menguasai materi ajar, tetapi juga memiliki akses terhadap informasi yang relevan guna meningkatkan kompetensinya. Kehadiran media internet telah membawa perubahan besar dalam cara informasi didistribusikan dan diakses, memberikan kemudahan bagi guru untuk mendapatkan informasi kapan saja dan di mana saja. Meskipun berbagai media lain seperti buku, televisi, surat kabar, dan radio masih menjadi sumber informasi, tidak semua informasi yang tersedia sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, guru perlu bersikap selektif dalam memilih informasi yang relevan, tepat, dan akurat. Salah satu keterampilan penting yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dalam konteks ini adalah literasi digital, yaitu kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan informasi dari berbagai sumber secara efektif. Literasi digital mencakup keterampilan untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi, mengaksesnya melalui perangkat seperti komputer atau ponsel pintar, serta menggunakan informasi tersebut secara tepat. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dunia pendidikan, tuntutan bagi guru untuk memiliki literasi digital yang memadai menjadi semakin penting guna mendukung proses pembelajaran secara optimal.

Menurut Potter (Rini et al., 2022:172) menyatakan bahwa "Literasi digital mencakup ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu dalam memanfaatkan

teknologi digital serta alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, menciptakan, serta berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat." Kemampuan literasi digital ini perlu dikembangkan dan menjadi kompetensi esensial yang harus dimiliki oleh seorang guru untuk mendukung pengembangan dunia pendidikan.

Menurut Kemendikbud (2020), strategi utama dalam membangun budaya literasi digital di sekolah mencakup tiga aspek, yaitu mengembangkan lingkungan fisik yang kaya literasi, membangun lingkungan sosial yang mendukung, dan menjadikan sekolah sebagai lingkungan akademis yang literat. Peningkatan kemampuan literasi digital pada guru sangat erat kaitannya dengan peran pemerintah dalam menyediakan layanan peningkatan kompetensi. Dengan demikian, literasi digital menjadi suatu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap guru.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), literasi digital di Indonesia masih berada pada kategori sedang dengan skor 3,47 dari skala 5. Menurut Research Director Katadata, Mulya Amri, angka ini menunjukkan bahwa literasi digital di Indonesia belum cukup baik dan perlu ditingkatkan agar mencapai skor 4 hingga 5. Salah satu contohnya, Indeks Literasi Digital Provinsi Banten pada tahun 2023 hanya mencapai 3,15. Literasi digital yang masih berada di tingkat cukup berdampak pada kemampuan masyarakat, termasuk guru, dalam memanfaatkan teknologi secara optimal, khususnya dalam mendukung pembelajaran berbasis teknologi.

Selain itu, fenomena terkini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital oleh guru masih terbatas pada kegiatan administratif atau komunikasi sederhana. Pemanfaatan media digital untuk mendesain pembelajaran inovatif masih jarang dilakukan, terutama di daerah dengan literasi digital yang belum optimal. Meskipun pemanfaatan teknologi digital dalam bidang pendidikan terus berkembang, pendayagunaan berbagai platform dan aplikasi pembelajaran digital oleh guru belum sepenuhnya menyentuh aspek pedagogis

secara mendalam. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan dalam integrasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-21. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi hal yang mendesak agar masyarakat dapat lebih maksimal dalam mengakses, memahami, dan menggunakan teknologi secara efektif.

Dalam konteks pendidikan di Provinsi Banten, literasi digital di kalangan guru juga masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan hasil observasi dan data awal, sebagian besar guru menunjukkan kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Meskipun telah ada berbagai program pelatihan literasi digital yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPTD TIK) Provinsi Banten, hasilnya belum maksimal. Banyak guru masih merasa kesulitan menggunakan teknologi secara efektif dalam proses belajar-mengajar.

Selain data kuantitatif, peneliti juga melakukan studi pendahuluan melalui wawancara awal dengan beberapa guru peserta diklat dan penyelenggara dari UPTD TIK Provinsi Banten. Berdasarkan wawancara tersebut, ditemukan bahwa banyak guru merasa pelatihan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan di lapangan. Sebagian guru menyebutkan kendala teknis seperti terbatasnya waktu praktik dan kurangnya pendampingan pasca pelatihan, sementara penyelenggara mengakui perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program.

Kondisi ini dapat dilihat dari capaian Uji Kompetensi Guru (UKG) di Provinsi Banten tahun 2020, yang rata-rata masih di bawah standar nasional. Berikut adalah data nilai UKG untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten:

Tabel 1 Data Uji Kompetensi Guru Provinsi Banten 2020

Kabupaten/Kota	Nilai UKG Pedagogik	Nilai UKG Profesional	Rata-Rata
Kab. Pandeglang	48.55	52.85	51.56
Kab. Lebak	49.34	54.02	52.61
Kab. Tangerang	51.36	57.48	55.64
Kab. Serang	50.05	54.89	53.44
Kota Cilegon	55.06	60.73	59.03
Kota Tangerang	53.78	61.40	59.11
Kota Serang	53.37	59.01	57.32
Kota Tangerang Selatan	56.27	64.37	61.94

Sumber: Kemendikbud, 2020

Dari tabel tersebut, Kabupaten Pandeglang memiliki rata-rata nilai UKG yang paling rendah di tingkat kabupaten di Provinsi Banten, yaitu 51,56, sedangkan Kota Serang memiliki rata-rata nilai UKG terendah di tingkat kota, yaitu 57,32. Nilai ini menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik dan profesional guru di kedua wilayah tersebut masih tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain, seperti Kota Tangerang Selatan dengan nilai 61,94 dan Kabupaten Tangerang 55,64.

Kondisi ini menggambarkan bahwa literasi digital guru di Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang masih menjadi tantangan yang harus diatasi.. Literasi digital yang rendah sangat mungkin menjadi salah satu penyebab rendahnya nilai UKG, terutama dalam aspek kompetensi professional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, kompetensi professional salah satunya mencakup kemampuan penguasaan materi, metode, strategi, dan inovasi dalam pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi dan literasi digital dalam mengajar. Dengan kondisi ini, Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan literasi digital para gurunya demi memperbaiki kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, program pendidikan dan pelatihan literasi digital yang telah dilakukan oleh UPTD TIK menjadi penting untuk mendukung peningkatan keterampilan guru.

Evaluasi terhadap program diklat literasi digital ini sangat diperlukan untuk menilai sejauh mana pelatihan telah memenuhi kebutuhan peserta dan memberikan dampak terhadap peningkatan kompetensi guru. Dalam administrasi pendidikan, evaluasi program merupakan bagian integral dari pengembangan sumber daya manusia, yang bertujuan memastikan efektivitas dan efisiensi pelatihan. Pendekatan ini relevan dengan peran UPTD TIK yang tidak hanya menyelenggarakan pelatihan, tetapi juga bertanggung jawab mengevaluasi keberhasilan program tersebut.

Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) karena model ini menawarkan pendekatan yang komprehensif dan sistematis dalam mengevaluasi program pelatihan. CIPP memungkinkan penilai untuk tidak hanya menilai hasil akhir (produk), tetapi juga untuk memahami konteks, input, dan proses yang terlibat dalam pelaksanaan program, yang memberikan gambaran lebih luas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program. Model CIPP juga sangat berguna dalam situasi di mana perbaikan berkelanjutan dan penyesuaian terhadap kebutuhan lokal sangat diperlukan.

Secara umum, evaluasi model CIPP mengacu pada empat komponen utama yang saling terkait, yaitu: 1) *Context* yang menilai kesesuaian program dengan kebutuhan atau situasi lokal, 2) *Input* yang mengkaji sumber daya dan perencanaan yang digunakan dalam program, 3) *Process* yang mengevaluasi bagaimana pelaksanaan program dilakukan, dan 4) *Product* yang mengukur hasil atau dampak akhir dari program tersebut. Dengan meninjau seluruh aspek ini, penelitian ini diharapkan dapat menjawab kendala dalam implementasi program pelatihan dan memberikan masukan strategis bagi UPTD TIK dalam merancang pelatihan yang lebih efektif di masa depan.

Berdasarkan pengamatan akan pentingnya penguasaan literasi digital dalam dunia pendidikan, masih terdapat kesenjangan kompetensi digital di kalangan guru, serta adanya urgensi program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi secara optimal. Menanggapi hal tersebut, UPTD TIK Provinsi Banten telah menyelenggarakan Program Diklat Literasi

Digital yang bertujuan membekali guru dengan keterampilan digital yang relevan untuk mendukung proses pembelajaran. Namun, optimalisasi program ini perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana pelatihan tersebut mampu meningkatkan kompetensi digital guru secara signifikan.

Berdasarkan persoalan tersebut, diperlukan sebuah pendekatan evaluatif yang tidak hanya menilai keberhasilan akhir, tetapi juga mengidentifikasi kelemahan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Dengan menggunakan model evaluasi CIPP, penelitian ini bertujuan memberikan solusi strategis, seperti perbaikan kurikulum pelatihan, peningkatan fasilitator, serta penyusunan rekomendasi desain pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan guru di daerah dengan kompetensi yang belum optimal. Oleh karena itu, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Program Diklat Literasi Digital Berdasarkan Model CIPP dalam Peningkatan Kompetensi Digital Guru di Provinsi Banten.”

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut.

- 1.2.1 Bagaimana evaluasi dilihat dari komponen *context* terkait dengan program Diklat Literasi Digital di Provinsi Banten?
- 1.2.2 Bagaimana evaluasi dilihat dari komponen *input* dalam pelaksanaan program program diklat literasi digital di Provinsi Banten?
- 1.2.3 Bagaimana evaluasi dilihat dari komponen *process* program diklat literasi digital di Provinsi Banten?
- 1.2.4 Bagaimana *product* dari pelaksanaan program diklat literasi digital di Provinsi Banten terhadap peningkatan kompetensi literasi digital guru?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1.3.1 Terdeskripsinya kesesuaian program diklat literasi digital berdasarkan komponen *context* di Provinsi Banten.
- 1.3.2 Terdeskripsinya kesiapan pelaksanaan program berdasarkan komponen *input* pada program diklat literasi digital di Provinsi Banten.

- 1.3.3 Terdeskripsinya kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana berdasarkan komponen *process* program diklat literasi digital di Provinsi Banten.
- 1.3.4 Terevaluasinya program diklat literasi digital terhadap peningkatan kompetensi literasi digital guru berdasarkan komponen *product* di Provinsi Banten.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Memperkaya literatur di bidang administrasi pendidikan, khususnya mengenai evaluasi program pendidikan dan pelatihan, dengan fokus pada program Diklat Literasi Digital.
- b. Memberikan wawasan baru mengenai evaluasi pelatihan literasi digital, menjadi referensi untuk penelitian lanjutan, serta berkontribusi pada pengembangan model evaluasi berbasis CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dalam konteks program pelatihan literasi digital di dunia pendidikan.
- c. Memberikan pemahaman tentang pentingnya literasi digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan peran program diklat literasi digital dalam mendukung kompetensi guru di era digital.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan rekomendasi strategis kepada UPTD TIK Provinsi Banten untuk merancang program pelatihan yang efektif dan sesuai kebutuhan guru, guna meningkatkan kompetensi literasi digital mereka.
- b. Memberikan masukan bagi pengambil kebijakan pendidikan, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pelatihan guru, agar kebijakan lebih tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi guru dalam menghadapi tantangan pendidikan berbasis teknologi.
- c. Peningkatan kompetensi literasi digital guru di Provinsi Banten dapat ditingkatkan melalui rekomendasi temuan penelitian ini,

sehingga berdampak positif pada kemampuan guru menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran.

- d. Memberikan strategi praktis untuk meningkatkan efektivitas program Diklat, baik dalam desain maupun pelaksanaannya, agar pengelola pendidikan di Provinsi Banten lebih efisien dalam mengelola pelatihan literasi digital bagi guru.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berada dalam ranah evaluasi program pelatihan dalam bidang Administrasi Pendidikan, khususnya pada aspek pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan literasi digital bagi guru. Fokus utama penelitian terletak pada pelaksanaan dan capaian program diklat literasi digital yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPTD TIK) Provinsi Banten. Model evaluasi yang digunakan adalah model CIPP (*Context, Input, Process, Product*), yang dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh terhadap keberlangsungan dan kualitas pelaksanaan program pelatihan.

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada dua wilayah, yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang. Pemilihan kedua wilayah ini didasarkan pada hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2020, yang menunjukkan bahwa rata-rata nilai kompetensi profesional guru di kedua daerah tersebut tergolong rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten.

Adapun ruang lingkup substansi penelitian meliputi empat komponen evaluasi dalam model CIPP, yaitu:

- 1.5.1 *Context* mencakup penelaahan terhadap latar belakang, tujuan, dan sasaran program diklat literasi digital
- 1.5.2 *Input* mencakup kurikulum pelatihan, sumber daya manusia (penyelenggara, instruktur, peserta), pendanaan, serta sarana dan prasarana pendukung
- 1.5.3 *Process* mencakup tahapan pelaksanaan program, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi pelatihan

1.5.4 *Product* mencakup hasil atau capaian program diklat berupa peningkatan kompetensi literasi digital guru setelah mengikuti pelatihan.

Ruang lingkup ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terhadap aspek-aspek yang dievaluasi, serta menghindari perluasan kajian ke luar fokus penelitian yang telah ditetapkan.